

**THE INFLUENCE OF GOVERNMENT POLICIES ON THE PERFORMANCE OF
SME COMPANIES
(EMPIRICAL STUDY OF SME's IN MAKASSAR CITY)**

WIHALMINUS SOMBOLAYUK¹
FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS, UNIVERSITAS ATMA JAYA
MAKASSAR, INDONESIA

ABSTRACT

This study aims to analyze the direct influence of government policies on the performance of SMEs. This research is a quantitative study using deductive methods. The number of samples is 180 SME companies in the food and beverage industry as the unit of analysis and analysis, regression with the help of Amos software.

The results of this study indicate that government policies have a direct positive effect on the performance of SME companies. The more quality government policies in developing SME companies will further improve the performance of SME companies.

The novelty of this study is that policy orders through production development programs, marketing, financial human resources, and institutional strengthening of SME companies have a direct and significant positive effect on the performance of SME companies.

Keywords: Government Policy, Small Medium Enterprise Company Performance

Article Info:

Received: 25 February 2023 | Revised: 15 April 2023 | Accepted: 29 May 2023

¹ Correspondence Author

**PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP KINERJA
PERUSAHAAN UKM
(STUDI EMPIRIS UKM DI KOTA MAKASSAR)**

WIHALMINUS SOMBOLAYUK
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS, UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR,
INDONESIA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh langsung kebijakan pemerintah terhadap kinerja UKM. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode deduktif. Jumlah sampel sebanyak 180 perusahaan UKM industri makanan dan minuman sebagai unit analisis dan analisis regresi dengan bantuan software Amos.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah berpengaruh positif secara langsung terhadap kinerja perusahaan UKM. Semakin berkualitas kebijakan pemerintah dalam mengembangkan perusahaan UKM akan semakin meningkatkan kinerja perusahaan UKM

Kebaruan penelitian ini adalah tatanan kebijakan melalui program pengembangan produksi, pemasaran, sumber daya manusia keuangan, dan penguatan kelembagaan perusahaan UKM berpengaruh positif secara langsung dan signifikan terhadap kinerja perusahaan UKM.

Kata-kata kunci: Kebijakan Pemerintah, Kinerja Perusahaan Usaha Kecil dan Menengah

1. PENDAHULUAN

Small Medium Enterprise (SMEs) atau di Indonesia dikenal dengan istilah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mempunyai peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. SMEs berperan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja, dan sebagai distribusi hasil pembangunan. SMEs mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kenaikan produk domestik bruto, tingkat partisipasi, dan produktivitas tenaga kerja, serta peningkatan ekspor Indonesia Bahkan pada waktu krisis ekonomi di Indonesia tahun 1998 dan tahun 2004, dimana banyak usaha berskala besar stagnan bahkan berhenti dari aktivitasnya, SMEs terbukti tangguh dan bahkan dianggap imun terhadap krisis ekonomi itu. Oleh karena itu SMEs ini perlu dipelihara dan dikembangkan menjadi salah satu pilar ekonomi kerakyatan.

Pada realitanya dan di tengah kinerja perusahaan UKM mendukung perekonomian Indonesia, masih terdapat berbagai hambatan yang dihadapi oleh UKM. Secara umum, ada dua hambatan utama yang dihadapi oleh UKM di Indonesia, yaitu hambatan finansial dan nonfinansial. Hambatan finansial antara lain adalah masih lemahnya akses UKM, ketersediaan dana, terbatasnya pengetahuan dalam pengelolaan keuangan dan akuntansi, belum ada pendekatan yang sistematis pada pendanaan UKM, biaya transaksi yang tinggi yang disebabkan oleh prosedur kredit yang cukup rumit sehingga menyita banyak waktu sementara jumlah kredit yang dikucurkan kecil, kesulitan UKM mengakses lembaga pendanaan yang formal baik disebabkan oleh ketiadaan atau kurangnya jumlah bank atau lembaga keuangan non bank di pelosok maupun ketersediaan informasi yang memadai, tingkat bunga kredit untuk investasi dan modal kerja yang cukup tinggi dan UKM yang belum *bankable*. Sedangkan yang termasuk dalam hambatan non finansial atau pengelolaan UKM di antaranya, yakni pertama kurangnya pengetahuan pada aspek produksi UKM yang disebabkan oleh penggunaan teknologi produksi yang konvensional, sistem *quality control* yang belum maksimal dan lemahnya daya saing produk, penerapan teknologi dan inovasi. Kedua, kelemahan pada aspek pengembangan sumber daya manusia UKM yang disebabkan oleh kurangnya kesempatan mengikuti perkembangan teknologi, pendidikan, dan pelatihan bagi pelaku UKM. Ketiga pada aspek pemasaran yang disebabkan oleh kurangnya informasi pemasaran dan lemahnya identifikasi dalam pasar sasaran dan keterbatasan kemampuan UKM untuk menyediakan produk/ jasa yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan pasar sasaran masih terbatasnya penggunaan teknologi dan informasi. Menteri Koperasi dan UKM menegaskan bahwa kelemahan pada industri khususnya pada UKM Indonesia adalah lemahnya strategi inovasi dalam berinovasi, kurangnya keterampilan sumber daya dan kapabilitas yang dimiliki oleh UKM dalam mencapai kinerja perusahaan seperti menjadi usaha yang lebih produktif, efisien, dan efektif. Sementara potensi besar yang dimiliki bangsa Indonesia seperti banyaknya sumber daya manusia dan sumber daya alam tanpa diiringi dengan adopsi teknologi yang mendorong inovasi baru maka industri di Indonesia akan sulit menghadapi persaingan di pasar lokal apalagi bersaing di pasar global. Kelemahan dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan UKM ini perlu diselesaikan oleh pemerintah melalui kebijakan atau regulasi dari pemerintah yang berpihak kepada peningkatan perusahaan UKM.

Di Indonesia peran pemerintah dalam upaya melindungi, memfasilitasi, dan mendukung perkembangan usaha kecil dinyatakan melalui Peraturan Pemerintah dan Perundang-Undangan seperti dalam UU Nomor 20 tahun 2008 yang saat ini berlaku. Kehadiran kebijakan pemerintah didukung oleh relevansi dengan perspektif *Resource Base Theory* (RBT) dan konsep kesuksesan usaha bahwa selain modal manusia, modal sosial, modal keuangan, terdapat pula sumber daya lainnya yang *intangible* (Barney, 1991) seperti kebijakan pemerintah dapat digunakan mencapai keunggulan bersaing (David, 2011). RBV atau RBT menegaskan bahwa dalam menghadapi persaingan bukan hanya diperlukan sumber daya fisik atau *visible* tetapi juga sumber daya yang *invisible* atau aset spesifik (Barney 1991), seperti modal kebijakan pemerintah (David, 2011) sebagai unsur kebaruan (*novelty*) yang ditawarkan dalam penelitian ini. kebijakan pemerintah dengan strategi inovasi yang menentukan kinerja perusahaan usaha.

Dari fenomena dan realitas diatas maka masalah pokok penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh langsung kebijakan pemerintah mengenai program pengembangan produksi, pemasaran, keuangan, sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan perusahaan UKM meningkatkan kinerja perusahaan UKM. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh langsung kebijakan pemerintah terhadap kinerja perusahaan UKM.

2. LANDASAN TEORI

Kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu penentu keberhasilan SMEs (Williams dan McGuire, 2010; Lans dkk., 2011; Keberhasilan atau kegagalan suatu usaha pada hakikatnya sangat dipengaruhi oleh kompetensi manajerial seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian sumber daya, kesungguhan berusaha dan kesiapan menghadapi perubahan (Laforet, 2011).

Teori-teori yang digunakan dalam membangun model kinerja UKM didasarkan pada teori seperti RBV, konsep strategi inovasi, dan konsep kinerja atau kinerja dan sejumlah penelitian hasil penelitian sebelumnya. Hal ini akan diuraikan sebagai berikut:

Resources Based View (RBV)

Organisasi atau dalam penelitian ini disebut SMEs merupakan sebuah entitas bisnis yang terdiri dari sekumpulan sumber daya dengan kapabilitas yang unik, yang mampu mendukung implementasi sebuah strategi untuk menghadapi persaingan dan mencapai tujuan perusahaan secara optimal. Sekumpulan kapabilitas sumber daya tersebut, terus berevolusi secara dinamis dalam usaha mendapatkan laba di atas rata-rata (Gib dan Li, 2003; Hitt dkk., 2011). Pandangan ini kemudian dikenal dengan nama *Resource Based View* (RBV) atau *Resource Based Theory* (RBT).

Sebagai ilmuwan yang mengonseptualisasikan perusahaan sebagai kumpulan sumber daya Wernetfelt (1984) menyatakan pertama kali asal-usul RBV dalam artikelnya yang berjudul *A Resource-Based View of the Firm and Distinctive Competencies*, yang didasarkan atas tulisan Penrose tentang *Definition of The Firm as A System of Productive Resources*. Namun teori yang paling berpengaruh adalah RBV yang dikemukakan oleh Barney (1991) yang berjudul *The Resources Based View of The Firm*.

Ada dua asumsi yang melekat pada RBT yaitu *resource heterogeneity* dan *resource immobility*. *Resource heterogeneity* (juga disebut *resource diversity*) menunjuk pada apakah sebuah perusahaan memiliki sumber daya atau kapabilitas yang juga dimiliki oleh perusahaan lain yang menjadi pesaingnya? sehingga sumber daya tersebut dianggap tidak dapat menjadi suatu keunggulan bersaing. Sedangkan *resource immobility* menunjuk pada suatu sumber daya yang sulit didapat oleh pesaing, untuk mendapatkan atau menggunakan sumber daya tersebut diperlukan biaya yang sangat tinggi.

Menurut Barney (1991) "*Resources that are valuable, rare, inimitable, and non substitutable lead to the achievement of sustainable competitive advantage that cannot be easily duplicated by competitors*".

Kebijakan Pemerintah

Konsep kebijakan pemerintah mengacu pada usaha pemerintah untuk membantu usaha kecil menjadi berkembang dalam berbagai aspek. Kebijakan ini tidak hanya memberikan manfaat bagi perusahaan namun juga memberikan dampak yang positif pada perekonomian makro seperti perekonomian memberikan kontribusi pada PDB, mengurangi tingkat pengangguran dan memperluas kesempatan kerja.

Kebijakan pemerintah terhadap usaha kecil pada dasarnya memiliki tiga aspek yang penting, yaitu penciptaan lingkungan ekonomi yang menguntungkan, deregulasi atau regulasi terhadap keberpihakan, penyediaan informasi bisnis dan dukungan perkembangan usaha kecil. Alasan untuk ini terletak pada premis bahwa perusahaan kecil akan lebih mampu merencanakan masa depannya dan lebih mungkin berinvestasi untuk pertumbuhan jangka panjang setelah diberi kondisi dalam bentuk kebijakan pemerintah.

Stanworth dan Gray (1991) menawarkan kritik teoritis yang kuat dari deregulasi. Mereka menyajikan tiga argumen yang saling terkait. Pertama, mereka mengantisipasi bahwa setiap perlakuan istimewa dari perusahaan-perusahaan yang lebih kecil dalam hubungannya dengan peraturan pasar tenaga kerja mungkin awalnya mengurangi biaya tetapi kemungkinan besar dalam jangka panjang untuk menurunkan upah dan kondisi kerja lainnya. Akibatnya, posisi kompetitif ini mungkin sebenarnya dikurangi sebagai karyawan berkualifikasi tinggi menjadi lebih sulit untuk menarik. Kedua, mereka menyarankan bahwa manfaat langsung terkait dengan deregulasi mungkin dalam memimpin jangka panjang untuk puas di antara operator yang lebih kecil.

Menurut Ahmad, dkk (2010) studi yang berfokus pada faktor eksternal biasanya memeriksa peran pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kinerja perusahaan bisnis yang lebih kecil. seperti kebijakan pemerintah melalui program dukungan pelatihan dan keuangan, pinjaman lunak dan bantuan ekspor, (Mahajar dan Moh. Yunus, 2006). penyediaan infrastruktur dasar, perlindungan terhadap persaingan dari bisnis besar (Yusuf, 1995); program pendidikan dan pelatihan (Robertson, dkk. 2003).

Penelitian yang dilakukan Dong Xiang dkk (2017) tentang perhatian pemerintah Australia terhadap usaha kecil, seperti pemberian bantuan keuangan berupa pemberian bantuan kredit atau pinjaman dan pemberian program pengembangan usaha kecil memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan usaha kecil dan menengah. Tambahan uang dari bantuan keuangan mendorong penerapan inovasi produk baru, memperkenalkan teknologi

baru, mendapatkan dana yang lebih besar, mencari akses terhadap konsultan yang profesional.

Keterlibatan pemerintah Indonesia dalam pengembangan usaha kecil dapat tergambar dari adanya fenomena intervensi pemerintah lewat regulasi dan deregulasi seperti dalam bentuk peraturan dan perundang-undangan, sudah lama dilakukan misalnya melalui UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, PP No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil, Inpres No. 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah, Keppres No. 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha yang dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang terbuka untuk Usaha Menengah atau Besar dengan Syarat Kemitraan, Keppres No. 56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah, Permeneg BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, Permeneg BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dan terakhir dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Keterlibatan atau intervensi pemerintah yang berinteraksi dengan perkembangan internal usaha mempengaruhi atau tidak mempengaruhi strategi inovasi dan mempengaruhi atau tidak kinerja perusahaan usaha. Kebijakan pemerintah dapat dipandang penting sebagai *resources based* (Barney, 1991) dalam menentukan model kinerja perusahaan usaha kecil.

Di Indonesia penerapan regulasi tentang inovasi terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Disebutkan inovasi daerah diperlukan dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Meskipun inovasi di Indonesia sudah berkembang pesat akan tetapi masih dilakukan secara relatif parsial, *piecemeal* dan stagnan. Parsial karena biasanya sebuah inovasi tidak otomatis terkoneksi dengan inovasi lain. Tidak terkoneksi dengan peta jalan (*road map*) organisasi, serta tidak memiliki visi jangka panjang. Sementara itu, sifat 'piecemeal' (satu per satu) inovasi mereka kurang memberi efek besar dan kolektif. Akibatnya, inovasi "tidak pergi ke mana-mana" alias stagnan.

Kebijakan pemerintah sangat penting dalam pengembangan UKM. Kebijakan-kebijakan tersebut mencakup upaya-upaya peningkatan kapasitas dan kinerja UKM), penguatan dan perluasan peran sistem pendukung usaha, dan peningkatan dukungan iklim usaha.

Kebijakan pemberdayaan diarahkan pada tataran dua tataran yakni makro dan mikro. Pada tataran makro adalah peningkatan sistem pendukung usaha yang mencakup lembaga atau sistem yang menyediakan dukungan bagi peningkatan akses UKM ke sumber daya produktif dalam rangka perluasan usaha dan perbaikan kinerja. Sumber daya produktif mencakup bahan baku, modal, tenaga kerja terampil, informasi dan teknologi. Perluasan usaha mencakup peningkatan tata laksana kelembagaan, peningkatan kapasitas dan perluasan jangkauan pasar. Sementara itu kebijakan pemberdayaan UKM pada tataran mikro mencakup peningkatan kualitas kelembagaan UKM serta perbaikan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) baik dari aspek kewirausahaan, maupun kemampuan teknis, manajemen dan pemasaran.

Jadi arah kebijakan tersebut dijabarkan lebih lanjut menjadi kebijakan-kebijakan bidang usaha koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pada tahun 2015-2019 diarahkan untuk meningkatkan daya saing koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar dalam rangka mendukung kemandirian perekonomian nasional.

Perspektif kajian pengembangan usaha kecil, studi ini akan difokuskan pada kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Bab VI pengembangan, pasal 16 ayat 1, yakni Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang:

1. produksi dan pengolahan;
2. pemasaran;
3. sumber daya manusia; dan
4. desain dan teknologi.

Pada peraturan tersebut ditetapkan bagaimana keberpihakan, keterlibatan dan peran pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam membantu pengembangan UKM, dalam empat dimensi, yakni peningkatan produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia dan desain dan teknologi yang dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) a huruf dilakukan dengan cara: sebagaimana yang tercantum dalam (pasal 17, uu. no. 20 tahun 2008),
2. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi usaha mikro, kecil, dan menengah;
3. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk usaha mikro, kecil, dan menengah;
4. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan;
5. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi usaha menengah;

Konsep Kinerja Perusahaan UKM

Baron & Kenney (1986) menyatakan bahwa terdapat berbagai perbedaan konsep tentang batasan kinerja (Omri dkk, 2012; 2014). Kinerja sering pula disebut dengan *performance* maupun *result* (yang berarti apa yang telah dihasilkan oleh karyawan atau suatu organisasi atau perusahaan. Istilah yang lain adalah *human output* yang dapat diukur dari *productivity*, *absence*, *turnover*, *citizenship*, dan *satisfaction* (Robbins, 1996).

Kinerja perusahaan bisnis keuangan mengacu pada kinerja perusahaan yang diukur dalam hal indikator keuangan, pasar, dan produksi. Lebih khusus lagi, mengukur kinerja perusahaan atau kegagalan dengan berbagai indikator keuangan, seperti laba, omzet penjualan, harga saham, pendapatan, dan sebagainya, menentukan kinerja perusahaan bisnis keuangan (Garrigos-Simon & Marques, 2004; Grant, Jammine, & Thomas, 1988; Tracey & Tan, 2001). Menurut Ahmad. N.H (2011), kinerja usaha kecil didasarkan pada kriteria berikut: (a) kepuasan dengan kinerja non-keuangan dan (b) kepuasan dengan kinerja keuangan. Dalam penelitian terbaru, Adamu (2014) mengukur kinerja perusahaan akumulatif pengusaha imigran menggunakan delapan indikator utama, termasuk

peningkatan omset dan pertumbuhan penjualan, profitabilitas, laba atas investasi, pangsa pasar, kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, hubungan dengan pemegang saham, hubungan dengan dewan direksi, kepuasan karyawan, hubungan dengan pemasok, serta citra dan branding bisnis.

Dimensi dan pengukuran kinerja perusahaan merupakan hal yang sangat menantang karena beberapa indikator kinerja tersebut seringkali memberikan hasil yang bertolak belakang (Acer,1993). Penelitian pengukuran kinerja terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah menggunakan indikator jumlah tenaga kerja dan peningkatan penjualan, dalam penelitiannya guna mengukur kinerja perusahaan terkadang sulit dilakukan karena masalah ketersediaan dan reliabilitas data (Acer, 1993; Rosa, Carter, Hamilton (dalam Mboko,2009).

Penelitian Lerner dan Almor (2002) menggunakan indikator penjualan, penghasilan pemilik perusahaan, dan jumlah tenaga kerja. Penelitian yang dilakukan oleh Covin dan Slevin (1989) mengukur kinerja keuangan perusahaan dengan menanyakan kepada setiap responden berdasarkan tingkat kepentingan perusahaan atas beberapa indikator keuangan, antara lain: tingkat penjualan, tingkat pertumbuhan penjualan, aliran kas, *return on equity*, *gross profit margin*, *net profit from operation*, *profit to sales ratio*, *return on investment*, dan kemampuan *re-investment*.

Pengukuran kinerja perusahaan dipenuhi problematika (Kanter dan Brinkerhoff, 1981, Tsai, MacMillan, dan Low, 1991). Penggunaan beberapa indikator akuntansi seperti: *net profit* dan *return on investment* masih menimbulkan pertanyaan karena beberapa perusahaan butuh waktu yang relatif lama untuk membukukan laba. Indikator *market share* juga dianggap masih tidak relevan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.

Oleh karena itu Scott dan Lars (1995) menggunakan 4 indikator untuk menilai kinerja, yaitu: (1) *average annual growth* berdasarkan jumlah rata-rata pegawai, (2) *growth in sales revenue* tahun buku terakhir, (3) *growth in profit* tahun buku terakhir, dan (4) tingkat profitabilitas.

Beberapa peneliti mencoba untuk mengatasi beberapa permasalahan terkait dengan keterbatasan data yang dimiliki oleh perusahaan dengan menggunakan indikator kinerja yang bersifat umum menggunakan 2 indikator untuk menilai kinerja perusahaan, yaitu: pertumbuhan penjualan dan laba.

Penelitian yang dilakukan oleh Chandler (1992) menggunakan 6 indikator kinerja yang terbagi atas 2 kelompok, yaitu: (1) indikator pertumbuhan: *growth in market share*, *change in cash flow*, dan *sales growth*; (2) indikator volume bisnis: *sales*, *earnings*, dan *net worth*.

Penelitian yang dilakukan oleh Covin dan Slevin (1989) mengukur kinerja keuangan perusahaan dengan menanyakan kepada setiap responden berdasarkan tingkat kepentingan perusahaan atas beberapa indikator keuangan, antara lain: tingkat penjualan, tingkat pertumbuhan penjualan, aliran kas, *return on equity*, *gross profit margin*, *net profit from operation*, *profit to sales ratio*, *return on investment*, dan kemampuan *re-investment*. Chandler (1992) menggunakan 6 indikator kinerja yang terbagi atas 2 kelompok, yaitu: (1) indikator pertumbuhan: *growth in market share*, *change in cash flow*, dan *sales growth*; (2) indikator volume bisnis: *sales*, *earnings*, dan *net worth*.

Augusto Felício dkk (2014) membangun konstruk tunggal dalam pengukuran kinerja perusahaan usaha kecil bahwa kinerja usaha kecil mencakup variabel pangsa pasar, penjualan, keuntungan, dan ukuran perusahaan. Variabel-variabel

ini diukur pada skala Likert lima poin, mulai dari kurang penting (1) ke lebih penting (5).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deduktif. Sampel perusahaan dalam penelitian ini sebanyak 180 perusahaan UKM industri manufacturing di kota Makassar yang diambil dengan menggunakan purposive sampling. Penelitian ini menggunakan analisis regresi dan jalur dengan bantuan software Amos.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Deskripsi masing-masing variabel, yakni variabel kebijakan pemerintah, strategi inovasi, kinerja perusahaan UKM dapat digambarkan sebagai berikut:

Kebijakan Pemerintah

Hasil komputasi diperoleh statistik deskriptif berupa nilai frekuensi dan rata-rata secara keseluruhan untuk variabel kebijakan pemerintah (X) terdiri dari dimensi produksi (KPPR) berjumlah 4 indikator, dimensi pemasaran (KPPM) berjumlah 3 indikator, dimensi sumber daya manusia (KPSD), berjumlah 3 indikator, dimensi Keuangan (KPKU) berjumlah 3 indikator, dan dimensi kelembagaan (KPKB) berjumlah 3 indikator dapat dilihat pada tabel 4.1

Tabel 1. Deskripsi Variabel Kebijakan Pemerintah

Skor Jawaban Persepsi Responden															
Dimensi	Indikator	STS		TS		RR		S		SS		Jml	Jml	Mean	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	N	%		
Produksi	KPPR1	0	0	3	1,7	4	23,9	11	62,8	2	11,1	18	10	3,84	
	KPPR	KPPR2	4	22	2	12	7	39,1	4	72	40	16,1	18	10	3,36
		KPPR3	8	43	2	13	6	36,6	7	70	38	17,2	18	10	3,32
	KPPR4	4	20	1	5,6	4	26,8	7	90	50	28	15,6	18	10	3,71
Total KPPR														14,23	
Mena KPPR														3,56	

...KINERJA PERUSAHAAN...
[W. SOMBOLAYUK]

Skor Jawaban Persepsi Responden

Dimensi	Indikator	STS		TS		RR		S		SS		Jml	Jml	Mean	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	N	%		
Pemasaran	KPPM1	9	5,0	19	11	57	31,7	74	41,1	21	11,7	180	100	3,44	
	KPPM2	9	56	16	8,9	53	30,0	88	48,9	13	7,2	180	100	3,44	
	KPPM3	6	30	20	11	47	26,1	88	48,9	19	10,6	180	100	3,71	
Total KPPM								10,59							
Mean KPPM								3,53							

Skor Jawaban Persepsi Responden

Dimensi	Indikator	STS		TS		RR		S		SS		Jml	Jml	Mean	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	N	%		
SDM	KPSD1	6	3,3	13	7,3	42	23,9	85	47,2	33	18,3	180	100	3,70	
	KPSD2	2	11	32	17,8	56	31,1	73	40,6	36	20,0	180	100	3,71	
	KPSD3	2	11	15	8,3	44	24,4	79	43,9	42	22,2	180	100	3,78	
Total KPSD								11,19							
Mean KPSD								3,73							

Skor Jawaban Persepsi Responden

Dimensi	Indikator	STS		TS		RR		S		SS		Jml	Jml	Mean	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	N	%		
Keuangan	KPKU1	2	1,1	10	5,6	42	23,3	110	61,1	16	8,9	180	100	3,71	
	KPKU2	0	0	14	7,8	38	18,9	110	61,1	22	12,2	180	100	3,78	
	KPKU3	2	11	13	7,2	14	7,8	107	59,4	32	17,8	180	100	3,86	
Total KPKU								11,35							
Mean KPKU								3,78							

Skor Jawaban Persepsi Responden

Dimensi	Indikator	STS		TS		RR		S		SS		Jml	Jml	Mean	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	N	%		
Kelembagaan	KPKB1	0	0,0	11	6,1	31	18,9	103	57,2	32	17,8	180	100	3,87	
	KPKB2	0	0	22	12,2	37	20,6	116	64,4	21	11,7	180	100	3,80	
	KPKB3	0	0	13	7,2	30	16,7	89	49,4	48	26,7	180	100	3,96	
Total KPKB								11,63							
Mean KPKB								3,88							
Mean Variabel KP								3,70							

Sumber data: Hasil Pengolahan Data Amos

Tabel 1 menggambarkan bahwa persepsi responden terhadap kebijakan pemerintah secara keseluruhan dalam pengelolaan perusahaan UKM. Variabel ini mempunyai nilai rata-rata skor mendekati 4, yakni 3,70 menggambarkan persepsi pimpinan atau pemilik perusahaan UKM cenderung setuju terhadap kebijakan pemerintah dalam pengembangan perusahaan UKM melalui dimensi pengembangan produksi, pemasaran, keuangan, dan kelembagaan. Teridentifikasi bahwa skor dimensi pengembangan kelembagaan (KPKB) mempunyai nilai rata-rata skor mendekati 4, yakni 3,88 tertinggi dari 4 dimensi lainnya, disusul oleh dimensi (KPKU) mempunyai nilai rata-rata skor mendekati 4, yakni 3,78. dimensi sumber daya manusia (KPSD) mempunyai nilai rata-rata skor mendekati 4, yakni 3,78, dimensi produksi (KPPR, dan dimensi pemasaran (KPPM) mempunyai nilai rata-rata skor mendekati 4, yakni 3,53.

Indikator pada dimensi pengembangan kelembagaan yang memberikan nilai rata-rata skor tertinggi dari 3 indikator adalah indikator KPKB3 mempunyai nilai rata-rata skor mendekati 4, yakni 3,96, Indikator ini menggambarkan persepsi pimpinan atau pemilik perusahaan cenderung setuju perusahaan program penguatan kelembagaan meningkatkan daya saing perusahaan. Kemudian disusul oleh indikator KPKB2 mempunyai nilai rata-rata skor mendekati 4, yakni 3,87 menggambarkan persepsi pimpinan perusahaan cenderung setuju program penguatan kelembagaan perusahaan dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga pemerintah. Indikator KPKB2 mempunyai nilai rata-rata skor mendekati 4, yakni 3,80 menggambarkan persepsi pimpinan dan pemilik perusahaan setuju bahwa program penguatan kelembagaan dari pemerintah meningkatkan kapasitas perusahaan. Indikator pada dimensi pengembangan keuangan yang memberikan nilai rata-rata skor tertinggi dari 3 indikator adalah indikator KPKU3 mempunyai nilai rata-rata skor mendekati 4, yakni 3,88, Indikator ini menggambarkan persepsi pimpinan atau pemilik perusahaan cenderung setuju program bantuan keuangan pemerintah memperkuat keuangan perusahaan. Kemudian disusul oleh indikator KPKU2 mempunyai nilai rata-rata skor mendekati 4, yakni 3,76 menggambarkan persepsi pimpinan perusahaan cenderung setuju perusahaan memperoleh bantuan kredit, dana hibah atau dana bergulir. Indikator KPKU1 mempunyai nilai rata-rata skor mendekati 4, yakni 3,71 menggambarkan persepsi pimpinan dan pemilik perusahaan setuju pemerintah mempermudah akses perusahaan kepada lembaga keuangan.

Indikator pada dimensi sumber daya manusia yang mempunyai nilai rata-rata skor tertinggi dari 3 indikator adalah indikator KPSD3 mempunyai nilai rata-rata skor mendekati 4, yakni 3,78. Indikator ini menggambarkan persepsi pimpinan atau pemilik perusahaan cenderung setuju program pemberdayaan, pelatihan, atau pengembangan SDM dari pemerintah meningkatkan kemampuan karyawan.

Kemudian disusul oleh indikator KPSD2 mempunyai nilai rata-rata skor mendekati 4, yakni 3,71 menggambarkan persepsi pimpinan perusahaan cenderung setuju materi pemberdayaan, pelatihan, atau pengembangan SDM dari pemerintah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Indikator KPSD1 mempunyai nilai rata-rata skor mendekati 4, yakni 3,70 menggambarkan persepsi pimpinan dan pemilik perusahaan setuju pemerintah memberikan program pemberdayaan, pelatihan, atau pengembangan SDM perusahaan.

...KINERJA PERUSAHAAN...
[W. SOMBOLAYUK]

Indikator pada dimensi pengembangan produksi (KPPR) yang memberikan nilai rata-rata skor tertinggi dari 3 indikator adalah indikator KPPR1 mempunyai rata-rata perusahaan skor mendekati 4, yakni 3,84, menggambarkan persepsi pimpinan atau pemilik perusahaan cenderung setuju peraturan pemerintah tentang UKM berpihak pada pengembangan perusahaan.

Kemudian disusul indikator KPPR4 mempunyai nilai rata-rata skor 4, yakni 3,7. menggambarkan persepsi pimpinan perusahaan cenderung setuju bahwa bantuan peralatan produksi meningkatkan kinerja perusahaan. Indikator KPPR2 mempunyai nilai rata-rata skor 3,36 menggambarkan persepsi pimpinan dan pemilik perusahaan menyatakan ragu-ragu bahwa pemerintah memberikan bantuan peralatan produksi kepada perusahaan. Indikator KPPR3 mempunyai nilai rata-rata skor 3,32 menggambarkan persepsi pimpinan dan pemilik perusahaan menyatakan ragu-ragu bahwa pemerintah memberikan bimbingan teknis terhadap penggunaan peralatan produksi. Indikator pada dimensi pemasaran yang memberikan nilai rata-rata skor tertinggi dari 3 indikator adalah indikator KPPM3 mempunyai nilai rata-rata skor mendekati 4, yakni 3,71, Indikator ini menggambarkan persepsi pimpinan atau pemilik perusahaan cenderung setuju bantuan pemasaran dari pemerintah meningkatkan penjualan perusahaan. Kemudian berturut-turut indikator KPPM2 dan KPPM1 mempunyai nilai rata-rata skor yang sama yakni 3,44. Kedua Indikator ini menggambarkan persepsi pimpinan dan pemilik perusahaan menyatakan keraguan terhadap pemerintah membantu jaringan pemasaran produk perusahaan dan mempromosikan produk perusahaan.

Kinerja Perusahaan UKM

Hasil komputasi diperoleh statistik deskriptif berupa nilai frekuensi dan rata-rata secara keseluruhan untuk variabel kinerja perusahaan UKM (Y3) terdiri dimensi kinerja berjumlah 12 indikator dapat dilihat pada tabel 4.2

Tabel 2. Deskripsi Variabel Kinerja Perusahaan UKM

Dimensi	Indikator	Skor Jawaban Persepsi Responden												
		STS		TS		RR		S		SS		Jml	Jml	Mean
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	n	%	
Kinerja	KUKM1	0	0	0	0,0	2	1,1	105	58,3	73	40,6	180	100	4,39
KUKM	KUKM2	0	0	0	0,0	9	5,0	97	53,9	74	41,1	180	100	4,36
	KUKM3	0	0	2	1,1	15	8,3	96	53,3	67	37,2	180	100	4,27
	KUKM4	0	0	0	0,0	12	6,7	105	58,3	63	35,0	180	100	4,28
	KUKM5	0	0	3	1,7	6	3,3	108	60,0	63	35,0	180	100	4,28
	KUKM6	0	0	8	4,4	3	1,7	119	66,1	50	27,8	180	100	4,17
	KUKM7	0	0	6	3,3	16	8,9	114	63,3	44	24,4	180	100	4,09
	KUKM8	0	0	6	3,3	20	11,1	93	51,7	61	33,9	180	100	4,16
	KUKM9	0	0	14	7,8	26	14,4	112	62,2	28	15,6	180	100	3,86
	KUKM10	0	0	3	1,7	8	4,4	118	65,6	51	28,3	180	100	4,21
	KUKM11	0	0	3	1,7	8	4,4	113	62,8	56	31,1	180	100	4,23
	KUKM12	0	0	0	0,0	3	1,7	97	53,9	80	44,4	180	100	4,43
	Total KUKM												50,73	
Mean Variabel KUKM												4,23		

Sumber data: Hasil Pengolahan Data Amos

Dari delapan belas indikator variabel kinerja perusahaan (KUKM), indikator yang mempunyai persepsi nilai rata-rata skor tertinggi adalah indikator KUKM12 nilai rata-rata skor 4,43 menggambarkan persepsi bahwa pimpinan atau pemilik perusahaan setuju keberadaan perusahaan meningkatkan kesejahteraan pemilik dan karyawan perusahaan. Kemudian disusul oleh indikator KUKM1 mempunyai nilai rata-rata skor 4,39 menggambarkan persepsi pimpinan atau pemilik perusahaan setuju jumlah produksi perusahaan meningkat. Indikator KUKM2 mempunyai nilai rata-rata skor 4,36 menggambarkan persepsi pimpinan atau pemilik perusahaan setuju omset penjualan perusahaan meningkat. Indikator KUKM 4 dan KUKM5 mempunyai nilai rata-rata skor yang sama, yakni sebesar 4,28 menggambarkan persepsi pimpinan atau pemilik perusahaan setuju harta tetap perusahaan bertambah dan indikator KUKM 5 menggambarkan persepsi pimpinan atau pemilik perusahaan setuju perusahaan mampu membayar kewajibannya. Indikator KUKM3 mempunyai nilai rata-rata skor 4,27 menggambarkan persepsi pimpinan atau pemilik perusahaan setuju pangsa pasar perusahaan meningkat.

Indikator KUKM11 mempunyai nilai rata-rata skor 4,23 menggambarkan persepsi pimpinan atau pemilik perusahaan setuju bahwa daya saing perusahaan semakin kuat. Indikator KUKM10 mempunyai nilai rata-rata skor 4,21 menggambarkan persepsi pimpinan atau pemilik perusahaan setuju pelanggan semakin puas terhadap kualitas layanan dan produk perusahaan. Indikator KUKM6 mempunyai nilai rata-rata skor 4,17 menggambarkan persepsi pimpinan atau pemilik perusahaan setuju keuntungan atau laba perusahaan meningkat.

Indikator KUKM8 mempunyai nilai rata-rata skor 4,16 menggambarkan persepsi pimpinan atau pemilik perusahaan setuju modal perusahaan semakin bertambah. Indikator KUKM7 mempunyai nilai rata-rata skor 4,09 menggambarkan persepsi pimpinan atau pemilik perusahaan setuju nilai investasi perusahaan semakin meningkat. Indikator KUKM9 mempunyai nilai rata-rata skor mendekati 4, yakni 3,86 menggambarkan persepsi pimpinan atau pemilik perusahaan cenderung setuju modal perusahaan bertambah.

Pengaruh Langsung Kebijakan Pemerintah Terhadap Kinerja Perusahaan UKM

Pengaruh langsung kebijakan pemerintah terhadap strategi inovasi, pengaruh kebijakan pemerintah terhadap kinerja perusahaan UKM, dan pengaruh strategi inovasi terhadap kinerja perusahaan UKM dapat dilihat dapat tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3. Pengaruh Kebijakan Pemerintah Terhadap Kinerja Perusahaan UKM

Pengaruh Antar Variabel		Nilai			
Variabel	Variabel	Standardized	CR	P-Value	Keterangan
Independen	Dependen				
Kebijakan Pemerintah	Kinerja Perusahaan UKM	0,094	1,802	0,036	Signifikan

Sumber data: Hasil Pengolahan Data Amos

Pengaruh Kebijakan Pemerintah terhadap Kinerja Perusahaan UKM

Antusiasme pemerintah melakukan deregulasi didasarkan pada gagasan bahwa perusahaan-perusahaan kecil menghadapi beban regulasi yang tidak masuk akal, krusial, dan menghambat perusahaan dengan kebijakan perusahaan kecil akan diringankan oleh beban tersebut. Dengan demikian pemilik dan manajer memiliki banyak waktu mencurahkan mengelolah perusahaan dan mengurangi waktu berhadapan dengan risiko sebagai konsekuensi dari melanggar peraturan, yang selanjutnya akan menghasilkan peningkatan pertumbuhan perusahaan. Fokus utama kebijakan pemerintah dalam kaitannya dengan usaha kecil, yakni penyediaan bisnis informasi dan berbagai instrumen dan program program pendidikan dan pengembangan (Stanworth, dkk 1991; Lee, ddk. 2011) . Argumentasinya bahwa perusahaan-perusahaan kecil tidak mungkin memiliki sumber daya besar dan struktur internal untuk mengumpulkan dan memproses informasi seefektif.

Hipotesis H_a yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif langsung kebijakan pemerintah terhadap kinerja perusahaan UKM. Koefisien pengaruh sebesar 0,094 dengan nilai kritis atau t sebesar 1,802 pada taraf signifikan p -Value $0,036 > 0,05$ menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah berpengaruh positif langsung kebijakan pemerintah akan langsung diikuti oleh peningkatan kinerja perusahaan UKM secara signifikan dengan asumsi faktor-faktor lain yang mempengaruhi kinerja perusahaan UKM dianggap konstan.

Hasil penelitian ini mendukung atau selajalan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dong Xiang, dkk (2017) bahwa kebijakan pemerintah terhadap usaha kecil, seperti pemberian bantuan keuangan, melalui intervensi pemberian bantuan kredit atau pinjaman dan pemberian bantuan program pengembangan terhadap usaha kecil dan menengah memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan usaha kecil usaha kecil dan menengah di Australia. Tambahan uang dari bantuan keuangan mendorong penerapan inovasi produk baru, memperkenalkan teknologi baru, mendapatkan dana yang lebih besar, mencari akses terhadap konsultan yang profesional.

Kebijakan pemerintah pada aspek keuangan seperti penyediaan pinjaman lunak dan pemerintah bantuan ekspor (Mahajar dan Mohd Yunus, 2006) dan non-keuangan penyediaan infrastruktur dasar, program pendidikan dan pelatihan (Robertson et al., 2003), dan perlindungan terhadap persaingan dari bisnis besar (Yusuf, 1995).

Hasil penelitian ini menunjukkan pula bahwa komitmen pemerintah terhadap pengembangan perusahaan UKM dalam upaya memperkuat perusahaan UKM adalah signifikan terhadap kinerja perusahaan UKM. Upaya pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia, bantuan pada bidang produksi, pemasaran, keuangan dan penataan kelembagaan dilakukan sesuai dengan regulasi atau peraturan baik pada level undang, keputusan presiden, menteri dan eksekusi oleh pemerintah daerah telah dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Menurut Ahmad, dkk (2010) studi yang berfokus pada faktor eksternal biasanya memeriksa peran pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kinerja perusahaan bisnis yang lebih kecil, seperti kebijakan pemerintah melalui program dukungan pelatihan dan keuangan, pinjaman lunak dan bantuan ekspor, (Mahajar dan Moh. Yunus, 2006). penyediaan infrastruktur dasar, perlindungan terhadap persaingan dari bisnis besar (Yusuf, 1995); program pendidikan dan pelatihan (Robertson, dkk 2003).

Penciptaan mekanisme sektor publik yang menghasilkan informasi bisnis yang tepat dan membantu perusahaan dalam pengembangan strategi yang cocok seperti tersedianya program pelatihan, pengembangan kapasitas sumber daya, akses ke pendanaan yang murah, cepat dan tidak berisiko dan berpihak pada usaha kecil dan menengah.

Berdasarkan hasil validitas, reliabilitas, *good of fit*, *confirmatory factor analysis* dan hasil pengujian hipotesis secara empiris serta dukungan hasil penelitian sebelumnya dan konsep kebijakan pemerintah yang dikemukakan antara lain Robertson dkk.(2003). Mahajar dan Mohd Yunus, (2006), Alberton dan Price, (2008), Link dan Scott, (2010), Yusuf, (1995), Stanworth dan Gray (1991); Yusuf, 1995); Robertson, dkk. 2003). Mahajar dan Moh. Yunus, 2006). Ahmad, dkk (2010), Anderson dkk, (2014) Leven dkk, (2014), Dong Xiang dkk (2017) didukung oleh pengipltentasian UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, PP No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil, Inpres No. 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah, Keppres No. 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha yang dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang terbuka untuk Usaha Menengah atau Besar dengan Syarat Kemitraan, Keppres No. 56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah, Permeneg BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, Permeneg BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dan terakhir dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Barney, 1991 dan David, 2009), serta konsep kinerja perusahaan atau organisasi yang dikemukakan antara lain oleh Baron & Kenney (1986), Kanter dan Brinkerhoff, (1981), Covin dan Slevin (1989), Campbell (1990), Tsai, MacMillan, dan Low (1991), Chandler (1992), Acer, (1993), Scott dan Lars(1995), Tracey & Tan (2001), Garrigos-Simon & Marques, (2004), Omri dkk, (2012; 2014), Adamu (2014), Lerner dan Almor (2002),), Ahmad, N.H (2011), dan Augusto Felício, dkk. (2014), maka penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan UKM. Semakin tepat kebijakan pemerintah terhadap program-program pengembangan perusahaan UKM, semakin meningkatkan kinerja perusahaan UKM

Dimensi-dimensi yang membentuk kebijakan pemerintah sebagai variabel mempengaruhi kinerja perusahaan UKM meliputi:

1. dimensi pengembangan produksi meliputi indikator: a) pemerintah memberikan bantuan peralatan produksi kepada perusahaan, b) pemerintah memberikan bimbingan teknis terhadap penggunaan peralatan produksi, c) bantuan peralatan produksi meningkatkan kinerja perusahaan;
2. dimensi pengembangan pemasaran meliputi indikator: a) pemerintah membantu mempromosikan produk perusahaan, b) pemerintah membantu jaringan pasar produk perusahaan, dan c) bantuan pemasaran dari pemerintah meningkatkan penjualan perusahaan;
3. dimensi sumber daya manusia meliputi indikator: a) pemerintah memberikan program pemberdayaan, pelatihan, atau pengembangan sdm perusahaan, b) materi pemberdayaan, pelatihan, atau pengembangan sdm dari pemerintah sesuai dengan kebutuhan perusahaan, c) program pemberdayaan, pelatihan, atau pengembangan sdm dari pemerintah meningkatkan kemampuan karyawan;

4. dimensi pengembangan keuangan meliputi indikator: a) pemerintah mempermudah akses perusahaan kepada lembaga keuangan, b) perusahaan memperoleh bantuan kredit, dana hibah atau dana bergulir dan c) program bantuan keuangan pemerintah memperkuat keuangan perusahaan;
5. dimensi pengembangan kelembagaan meliputi indikator: a) program penguatan kelembagaan perusahaan dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga pemerintah, b) program penguatan kelembagaan dan pemerintah meningkatkan kapasitas perusahaan, dan c) program penguatan kelembagaan meningkatkan daya saing perusahaan

Dimensi atau indikator yang membentuk kinerja perusahaan UKM sebagai variabel yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah terdiri dari: 1) peningkatan jumlah produksi perusahaan, 2) peningkatan omset penjualan perusahaan, 3) peningkatan pangsa pasar perusahaan, 4) peningkatan harta tetap perusahaan bertambah, 5) perusahaan mampu membayar kewajibannya, 6) peningkatan keuntungan atau laba perusahaan 7) peningkatan nilai investasi perusahaan, 8) peningkatan modal perusahaan semakin, 9) pelanggan semakin puas terhadap kualitas produk dan layanan perusahaan.

Jadi kesimpulan bahwa kebijakan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan UKM diterima. Semakin berkualitas program- program pemerintah terhadap pengembangan perusahaan UKM semakin meningkat kinerja perusahaan UKM.

5. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah meliputi dimensi pengembangan aspek produksi, pemasaran sumber daya manusia, keuangan dan penguatan kelembagaan berpengaruh positif langsung signifikan terhadap peningkatan kinerja perusahaan UKM terdiri dari peningkatan jumlah produksi perusahaan, peningkatan omset penjualan perusahaan, peningkatan pangsa pasar perusahaan, peningkatan harta tetap perusahaan bertambah, perusahaan mampu membayar kewajibannya, peningkatan keuntungan atau laba perusahaan, peningkatan nilai investasi perusahaan, peningkatan modal perusahaan semakin, pelanggan semakin puas terhadap kualitas produk dan layanan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Acer, A. (1993). The impact of key internal factors on firm performance: An empirical study of Small Turkish firms. *Journal of Small Business Management*, 31(4), 86-92.
- Adamu, I. M. (2014). Spirituality, religiosity, entrepreneurial motivation and performance among Nigerian entrepreneurs (Unpublished doctoral thesis). International Islamic University Malaysia, Kuala Lumpur.
- Ahmad, N.H., Halim, H.A., & Zainal, S.R.M. (2010). Is entrepreneurial competency the silver bullet for SME success in a developing nation?. *International Business Management*, 4(2), pp. 67-75
- Ahmad, N.H., Wilson, C. and Kummerow, L. (2011). Assessing the dimensionality of business success: the perspectives of Malaysian SME owner-managers. *Journal of Asia-Pacific Business*, 12(3), 207-224.
- Anis, O., & Mohamed, F. (2012). How entrepreneurs identify opportunities and access to external financing in Tunisian's micro-enterprises?. *African Journal of Business Management*, 6(12), 4635.
- Augusto J. F., Eduardo, C., & Jorge. C. (2014). Human capital, social capital and organizational performance. *Management Decision*, 52(2), 350.
- Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. *Journal of Management*, 17(1), 99-120.
- Baron, RM., & Kenny, DA. (1986). The moderator-mediator variable distinction in social, psychological research: Conceptual, strategic, and statistical consideration. *Journal of Personality and Social Psychology*, 51(6), 11-73.
- Chandler, G. N., & Jansen, E.J. (1992). Founders self assessed competence and venture performance. *Journal of Business Venturing*, 7(3), 223-236.
- Covin, J. G., & Slevin, D. P. (2002). The entrepreneurial imperatives of strategic leadership. In M. A. Hitt, R. D. and imitability in the pharmaceutical industry: An analysis of their relationship with firm performance. *Journal of Management*, 29, 27-50.
- Covin, J. G., & Slevin, D.P. (1989). Strategic management of small firm in hostile and began environments. *Strategic Management Journal*, 10(1), 75-87.
- David, F. R. (2011). *Strategic management concepts and cases*. Prentice hall.
- Garrigos-Simon, F. J., & Marques, D. P. (2004). Competitive strategies and firm performance: A study in the Spanish hospitality sector. *Management Research*, 2(3), 251-269.

- Gibb, A., & Li, J. (2003). Organising for enterprise in China: what can we learn from the Chinese micro, small, and medium enterprise development experience. *Futures*, 35(4), 403-421.
- Hitt, M.A., Ireland, R.D., Sirmon, D.G., & Trahms, C.A. (2011). Strategic entrepreneurship: creating value for individuals, organizations, and society. *The Academy of Management Perspectives*, 25(2), 57-75.
- Kanter, R. M., & Brinkerhoff, D. (1981). Organizational performance: Recent developments in measurement. *Annual review of sociology*, 7(1), 321-349.
- Laforet, S. (2011). A framework of organisational innovation and outcomes in SMEs. *International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research*, 17(4), 380-408.
- Lans, T., Verstegen, J., & Mulder, M. (2011). Analyzing, pursuing and networking: Towards a validated three-factor framework for entrepreneurial competence from a small firm perspective. *International Small Business Journal*, 29(6), 695-713.
- Lee, S. M., Peris-Ortiz, M. dan Fernández-Guerrero, R. (2011). Corporate entrepreneurship and human resource management: theoretical background and a case study. *International Journal of Manpower*, 32(1) pp. 48-67.
- Lerner, M., & Almor, T. (2002). Relationships among strategic capabilities and the performance of women-owned small ventures. *Journal of small business management*, 40(2), 109-125.
- Levén, P., Holmström, J. and Mathiassen, L. (2014), "Managing research and innovation networks: evidence from a government sponsored cross-industry program", *Research Policy*, Vol. 43 No. 1, pp. 156-168.
- Link, A. N., & Scott, J. T. (2010). Government as entrepreneur: Evaluating the commercialization success of SBIR projects. *Research Policy*, 39, 589-601.
- Mahajar, A. J., & Mohd Yunus, J. (2006). The effectiveness of government export assistance programs on Malaysia small & medium enterprises (SMEs). *Problems & Perspectives in Management*, 1, 58-71.
- Mboko, S., & Smith-Hunter, A. E. (2009). Women entrepreneurs in Zimbabwe: A case study. *Journal of Global Business Issue*. Burbank: Spring. (3)1, 157.
- Omri, A., & Ayadi-Frikha, M. (2014). Constructing a mediational model of small business growth. *International Entrepreneurship and Management Journal*, 10(2), 319-342.
- Penrose, E.T. (1995). *The Theory of The Growth of The Firms*, New York: Wiley.
- Porter, M. E. (1985). *Competitive Advantage*. New York: Free Press.

- Robertson, M., Collins, A., Medeira, N., & Slater, J. (2003). Barriers to start-up and their effect on aspirant entrepreneurs. *Education + Training*, 45(6), 308-316.
- Scott, S. and Lars, K. (1995). National Environment, Strategy, and New Venture Performance: A Three Country Study. *Journal of Small Business Management*, 33(2), 37-51
- Stanworth, J., Gray, C., & Bolton. (1991). *Twenty Years on: The Small Firm in the 1990s*. Paul Chapman Publishing, London, p. 16.
- Tracey, M., & Leng Tan, C. (2001). Empirical analysis of supplier selection and involvement, customer satisfaction, and firm performance. *Supply chain management: An international journal*, 6(4), 174-188.
- Tsai, W. M. H., MacMillan, I. C., & Low, M. B. (1991). Effects of strategy and environment on corporate venture success in industrial markets. *Journal of business venturing*, 6(1), 9-28.
- Wernerfelt, B. (1984). A Resources-Based View of The Firm. *Strategic Management. Journal*, 5, 171-180.
- Williams, L. K., & McGuire, S. J. (2010). Economic creativity and innovation implementation: The entrepreneurial drivers of growth? Evidence from 63 countries. *Small Business Economics*, 34, 391-412.
- Yusuf, A. (1995). Critical success factors for small business: Perceptions of South Pacific entrepreneurs. *Journal of small business management*, 33(2), 68.